



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) TAHUN 2018**

**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dilakukan berbagai kebijakan perubahan peraturan perundang-undangan termasuk reformasi birokrasi, perubahan paradigma perencanaan pembangunan dan penganggaran yang lebih transparan dengan pelibatan seluruh pemangku kepentingan dan komponen masyarakat (*bottom up*). Tuntutan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dibutuhkan suatu sistem dan mekanisme pertanggungjawaban yang terukur, jelas mudah dipahami dan batasan waktu bagi setiap instansi pemerintah.

Sejalan dengan itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk menyusun Pelaporan Kinerja dan Laporan Keuangan secara triwulanan dan tahunan.

Laporan Kinerja Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi NTT berdasarkan perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan baik kinerja program (hasil), kinerja kegiatan (keluaran), Indikator Kinerja Sasaran (RPJMD & Renstra) dan Indikator Kinerja Utama. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat berguna sebagai alat kontrol bagi setiap unit kerja dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan serta penganggaran yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan serta bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kiranya dengan adanya laporan kinerja ini dapat memberikan dampak bagi setiap aparatur pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk meningkatkan kualitas hasil kerja dan etos kerja bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya pembangunan sektor transportasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah sebagai berikut:

1. Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 (lima) UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan baik menyangkut kinerja program (hasil), kinerja kegiatan (keluaran), dan indikator kinerja sasaran (RPJMD dan Renstra) serta Indikator Kinerja Utama yang ada termasuk Laporan Keuangan dalam Tahun Anggaran 2018.

2. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 (lima) UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Capaian Kinerja antara yang direncanakan/ditetapkan dengan yang terlaksana atau yang direalisasikan /yang dikerjakan, baik kinerja program (hasil), kinerja kegiatan (keluaran) maupun indikator kinerja lainnya yang termuat dalam RPJMD, Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- b. Mengetahui permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan penganggaran serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk pemecahannya untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja pelaksanaan tugas pada masa yang akan datang.

C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTT

1. Tugas Pokok

Berdasarkan amanat Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Pergub Nusa Tenggara Timur No. 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas : “ ***Membantu Gubernur Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Yang di Tugaskan Kepada Daerah***’.

2. Fungsi

Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan ;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan ;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan (darat, laut dan udara) ;
- 4) Pembinaan unit pelaksana teknis ;
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga ;
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

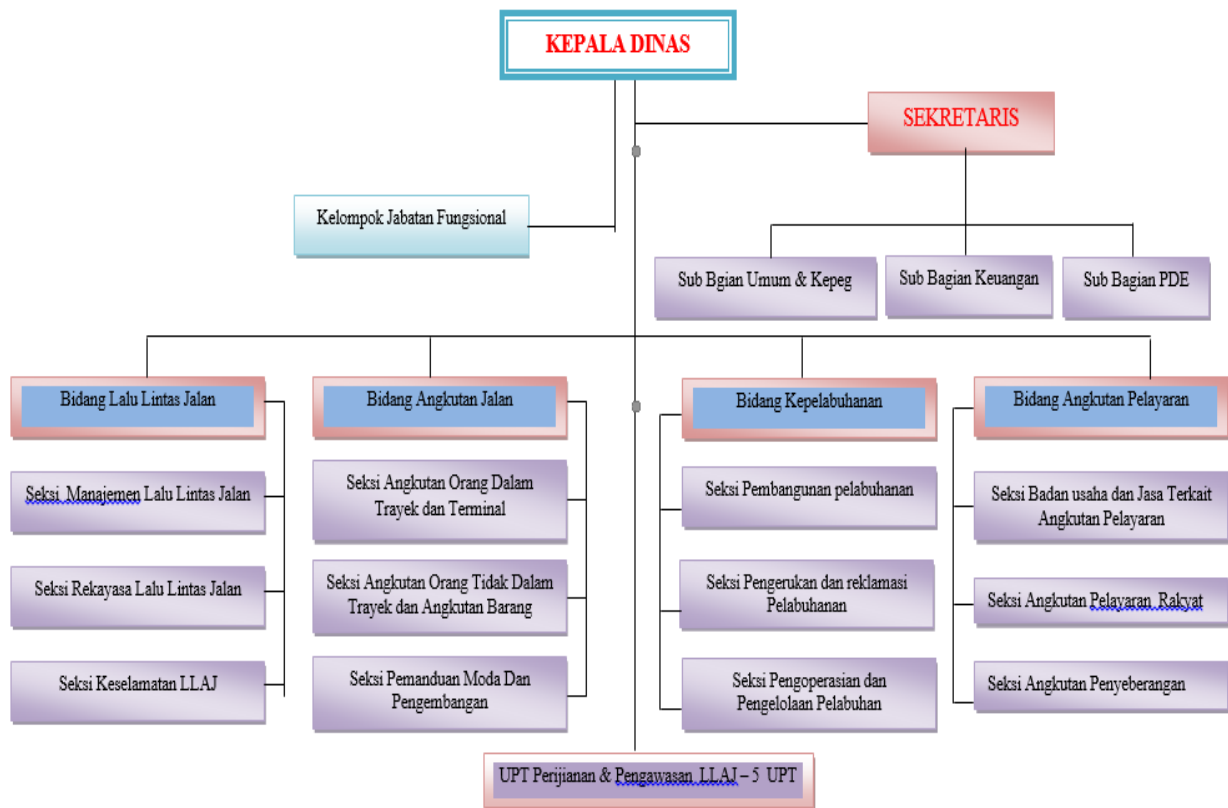
3. Struktur Organisasi

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan jalannya roda organisasi dibutuhkan struktur dan sumber daya manusia sebuah organisasi dalam system formal hubungan kerja yang membagi dan mengkoordinasi tugas – tugas sejumlah orang untuk bekerjasama dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi NTT terdiri dari: Kepala Dinas; Sekretaris; Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan; Kepala Bidang Angkutan Jalan; Kepala Bidang Kepelabuhan; Kepala Bidang Angkutan Pelayaran; dan Ada 5 UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan. Pada sekretaris, Bidang dan UPT masing – masing membawahi 3 sub bagian/seksi.

Adapun 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis Perijinan dan Pengawasan LLAJ Dinas Perhubungan Provinsi NTT yaitu:

1. UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua, Alor
2. UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ Wilayah Belu, TTS, TTU, dan Malaka
3. UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ Wilayah Lembata, Sikka, Flotim, Ende dan Nangekeo
4. UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ Wilayah Manggarai, Manggarai Timur, Ngada dan Manggarai Barat
5. UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ Wilayah Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur



Total jabatan struktural yang ada pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT (Kantor Dinas & 5 UPT) sebanyak 41 (empat puluh satu) jabatan struktural dengan rincian eselon sebagai berikut:

- ❖ Eselon II : 1 orang
- ❖ Eselon III : 10 orang, yang belum terisi 1 bidang (Angkutan Jalan)
- ❖ Eselon IV : 22 orang, yang belum terisi 2 seksi

Untuk mendukung dan menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perhubungan Provinsi NTT memiliki jumlah staf sebanyak 136 orang termasuk tenaga fungsional 2 orang. Jadi total keseluruhan pegawai Dinas Perhubungan Provinsi NTT sampai 31 Desember 2018 yaitu 136 orang, yang terdiri dari : pejabat struktural 36 orang (belum terisi 3 jabatan), fungsional 2 orang (fungsional arsiparis) dan staf : 98 orang.

D. Fasilitas Penunjang Pelaksanaan Tugas/Aset

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas didukung dengan sarana dan prasarana gedung kantor, peralatan/mesin dan fasilitas kendaraan operasional. Sesuai data yang ada kendaraan Roda 2 sebanyak 5 unit, roda 4 sebanyak 4 unit. Selain itu Dinas Perhubungan Provinsi NTT saat ini memiliki aset berupa rumah dinas (2 unit) dan tanah di beberapa lokasi seperti tanah di Lasiana, Naikoten II, Oebobo, Oeba dan Pasir Panjang, serta fasilitas perlengkapan lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi yang baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik karena umur. Prasarana tersebut sudah berusia di atas 20 tahun, seperti Kantor Dinas yang ada sekarang usianya kurang lebih 40 tahun. Pada Tahun Anggaran 2010 telah dilakukan SID pembangunan gedung kantor baru, setiap tahun telah diusulkan untuk pembangunan gedung kantor, namun karena keterbatasan dana APBD sehingga belum dibangun juga. Sedangkan untuk UPT, sampai saat ini belum memiliki Kantor dan Kendaraan Roda 4 (operasional) untuk melakukan pengawasan dengan cakupan wilayah kerja yang cukup luas. Jenis dan Nilai Aset tersebut mencapai kurang lebih sebesar Rp 69.681.988.178.25,-

Data aset tetap dan nilainya masing-masing sebagaimana digambarkan pada Gambar 2.2 berikut.

Gambar 2.2. Data Jenis dan Nilai Aset Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2018

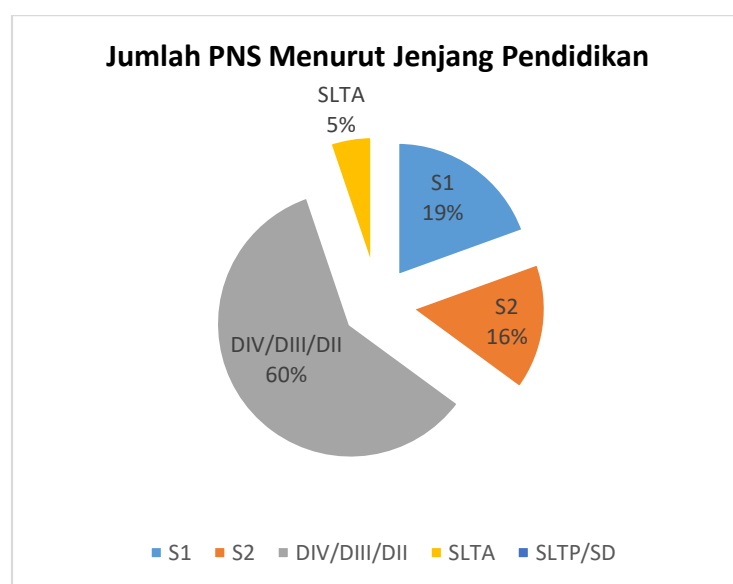
Jenis Aset Tetap	Nilai Aset (Rp.)
Tanah	40.402.571.500
Peralatan dan Mesin	2.044.291.403
Gedung dan Bangunan	16.339.682.341.25
Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.267.397.434
Konstruksi Dalam Pengerjaan	
Aset Tetap Lainnya	1.628.045.500.00
Jumlah	69.681.988.178.25

E. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan

Sumber daya manusia (SDM) aparatur merupakan faktor penentu utama untuk melaksanakan roda organisasi yang perlu mendapat perhatian baik aspek kualifikasi maupun kuantitas dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan kinerja organisasi demi

terwujudnya visi, misi dan tujuan organisasi. Dinas Perhubungan Provinsi NTT sebagai instansi teknis yang diberi tanggungjawab dalam sektor Perhubungan tentunya membutuhkan aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis perhubungan (darat, laut dan udara). Sesuai dengan data yang ada pegawai Dinas Perhubungan sebagian besar bukan merupakan basic perhubungan ataupun teknik sehingga ke depannya perlu ditingkatkan pengetahuan dan kemampuan teknisnya melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan kursus – kursus singkat sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna jasa transportasi yang berkualitas, selamat, aman, lancar dan terpadu. Ketersediaan tenaga teknis yang bersertifikat untuk melakukan pengawasan dan penindakan, pengujian kendaraan bermotor yang ditempatkan di UPT sama sekali tidak memadai (tenaga PPNS, Penguji Kendaraan, tenaga pengelola/operasi pelabuhan). Saat ini Dinas Perhubungan Provinsi NTT hanya memiliki 2 (dua) orang tenaga penguji yang bertugas di Kantor Dinas, 2 orang tenaga PPNS di UPT Kupang, serta 8 orang yang telah dilatih untuk pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan penyeberangan. Sehingga ke depannya perlu mendapatkan perhatian dan dukungan pendanaan untuk pelatihan teknis, bimtek dan kursus-kursus singkat bagi staf teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan perijinan dan pengawasan.

Jumlah PNS Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut jenjang pendidikan sebagaimana pada Gambar 2.3 berikut :



Dukungan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 (lima) UPT Perijinan dan Pengawasan se NTT Tahun Anggaran 2018 dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dishub NTT dan UPT sebesar Rp. **26.935.525.900,-** yang terdiri dari :

- ❖ Belanja Tidak Langsung Rp. 12.393.009.000,-
- ❖ Belanja Langsung Rp. 14.542.516.900,-

Terhadap dana yang bersumber dari APBN, tidak lagi dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTT sejak diberlakukannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana terjadi perubahan dalam mekanisme pengelolaan keuangan negara, khususnya terhadap pembiayaan yang bersumber dari APBN (Dana Pusat) pada sektor Perhubungan langsung dikelola oleh UPT Pusat / Satuan Kerja Sementara yang berada di Dishub Provinsi NTT dan bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Perhubungan RI.

Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 (lima) UPT Perijinan dan Pengawasan se-NTT pada mekanisme pertanggungjawaban / akuntabilitas menjadi parsial dalam pengukuran kinerja karena hanya melaksanakan tugas – tugas yang dibiayai dari dana APBD, sedangkan dana yang bersumber dari APBN tidak lagi ditangani Dinas Perhubungan Provinsi NTT (dana sektoral/Kementrian Perhubungan) karena hanya menjalankan fungsi koordinasi perencanaan, program dan kegiatan.

F. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Penyajian LKIP ini terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu:

- BAB I Pendahuluan, menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Profil dan Sistematika Penyusunan.
- BAB II Perencanaan Kinerja, menguraikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan CaraPencapaian Tujuan dan Sasaran.
- BAB III Akuntabilitas Kinerja, menguraikan Indikator Kinerja, Capaian Kinerja, Aspek Keuangan dan Permasalahan yang dijumpai Dinas Perhubungan Provinsi NTT.
- BAB IV Penutup, berisi Tinjauan Umum yang mengemukakan keberhasilan / kegagalan, permasalahan, Rekomendasi yang berkaitan dengan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi NTT.

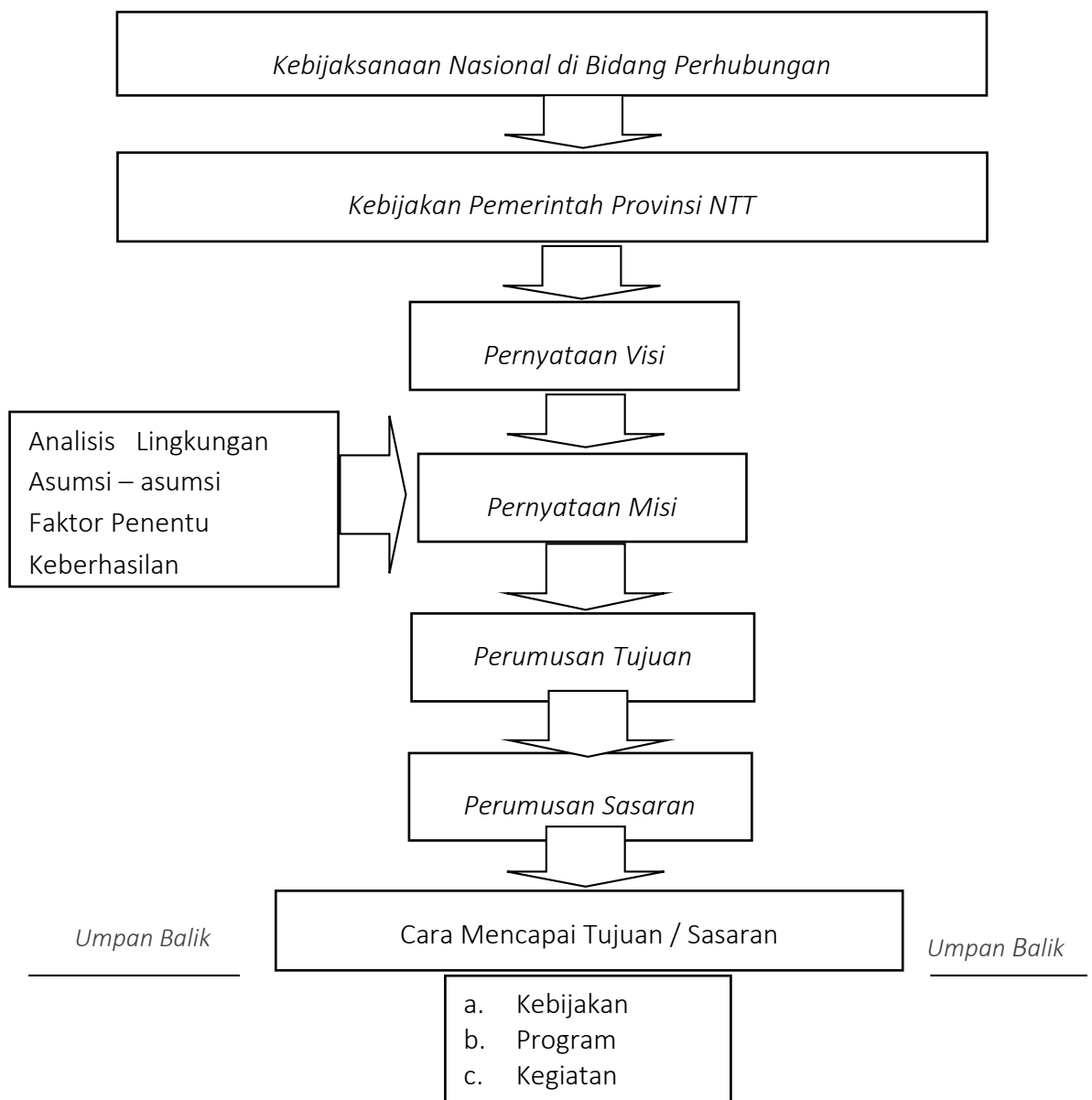
BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTT

Perencanaan Strategik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama – sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi (*stake holder*) untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian visi dan misi. Perumusan rencana strategik tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan – tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal / kualitatif sampai dengan yang paling teknis / kuantitatif. Tahapan – tahapan tersebut merupakan rangkaian yang saling terkait dalam mencapai suatu tujuan bersama terhadap visi dan misi organisasi.

Model rencana strategik yang disusun mengikuti pola sebagai berikut:



Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2013 – 2018 telah disusun berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT Nomor : SK.33/PR.006/D.PHB-2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018. Rencana strategis ini

menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Sektor Perhubungan di Provinsi NTT baik program dan kegiatan pembangunan/pengembangan sarana/prasarana perhubungan yang dibiayai dana APBD Provinsi NTT maupun sumber dana APBN. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 merupakan tahun kelima pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTT. Secara umum Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTT memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja beserta target kinerja tahunan. Indikator Kinerja Sasaran atau Indikator Kinerja Utama Sektor Perhubungan secara rinci dan jelas dicantumkan dalam Renstra Bab VI sebagai penjabaran RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013 – 2018 Bab IX. Uraian singkat Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2013 – 2018 adalah:

Visi

“ Terwujudnya Sistem Transportasi Yang Selamat, Efektif, Efisien dan Terpadu Dalam Satu Kesatuan Sistem Transportasi Nasional “,

Misi, untuk menjabarkan dan menjalankan visi tersebut maka ditetapkanlah misi sebagai berikut :

- a) Meningkatkan Pengetahuan dan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Sektor Transportasi;
- b) Meningkatkan, mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana fasilitas perhubungan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan pariwisata serta sektor lain yang berbasis tata ruang dan ramah lingkungan;
- c) Menyeimbangkan dan menjaga infrastruktur perhubungan antar pulau melalui pendekatan sabuk transportasi dengan membangun konektivitas kabupaten/kota, antar kabupaten/kota, antar provinsi, nasional dan internasional;

- d) Mengembangkan integrasi layanan berbagai moda transportasi dan layanan angkutan publik yang bermutu;
- e) Meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi ;
- f) Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat, swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana transportasi.

2. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Sektor Perhubungan 5 (lima) tahun ke depan dijabarkan lebih lanjut dalam penetapan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Berdasarkan misi dan faktor – faktor kunci keberhasilan, maka Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan tujuan sebagai berikut:

- a) Misi - 1 Meningkatkan Pengetahuan dan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Sektor Transportasi, dengan tujuan :
 - a. Meningkatkan kualitas SDM aparatur (Struktural, Teknis dan Fungsional).
 - b. Meningkatkan kinerja pelayanan SKPD
- b) Misi-2 Meningkatkan, mengembangkan dan memelihara prasarana dan sarana fasilitas perhubungan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan kepariwisataan serta sektor lain yang berbasis tata ruang dan ramah lingkungan, dengan tujuan :
 - a. Meningkatkan mutu perencanaan serta jumlah sarana dan prasarana transportasi.
 - b. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi daerah.
 - c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor perhubungan.
- c) Misi – 3 Menyeimbangkan dan menjaga infrastruktur perhubungan antar pulau melalui pendekatan sabuk transportasi dengan membangun konektivitas kabupaten/kota, antar kabupaten/kota, antar provinsi, nasional dan internasional, dengan tujuan :

- a. Mewujudkan konektivitas layanan transportasi dalam wilayah kabupaten/kota, antara kabupaten/kota, antar provinsi dan antar negara yang berbatasan langsung dengan wilayah NTT.
- b. Mengembangkan layanan angkutan keperintisan sebagai pendukung transportasi pada daerah terisolir/tertinggal dan daerah sasaran program Desa Mandiri Anggur Merah.
- d) Misi – 4 Mengembangkan integrasi layanan berbagai moda transportasi dan layanan angkutan publik yang bermutu, dengan tujuan :
 - a. Mewujudkan pelayanan transportasi publik yang terpadu, lancar dan nyaman.
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang memadai baik jumlah maupun kapasitasnya.
- e) Misi – 5 Meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi, dengan tujuan :
 - a. Meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kejadian kecelakaan lalu lintas.
 - b. Mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas yang berakibat pada banyaknya korban meninggal.
- f) Misi – 6 Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana transportasi, dengan tujuan :
 - a. Membangun kemitraan dalam penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan masyarakat, swasta, BUMN dan BUMD.
 - b. Meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam membangun dan menjaga prasarana dan fasilitas perhubungan.

3. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dan menggambarkan hal yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 (Lima) UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ se-NTT melalui implementasi – implementasi nyata yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ada dapat memberikan arah dan langkah dalam penyusunan kegiatan yang bersifat khusus dan terukur, akuntabel, realistis dan berlaku dalam periode tertentu.

Sasaran yang dicapai Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 (lima) UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ se NTT dilakukan dalam 5 (lima) tahun untuk dapat diukur sampai sejauh mana dampak yang dibuat dalam sasaran tersebut baik dari hasil yang didapat dalam organisasi maupun manfaat nyata baik internal maupun eksternal serta dampak terhadap masyarakat sebagai muara terakhir dalam pemberian pelayanan transportasi melalui organisasi Dinas Perhubungan Provinsi NTT.

Sasaran tersebut merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik instansi pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi NTT dengan fokus utamanya adalah memberikan pendalaman dalam penentuan sasaran tersebut melalui tindakan (*action*) dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional sehingga untuk mencapai sasaran tersebut Dinas Perhubungan Provinsi NTT menyusun rencana kegiatan (Program kerja) tahunan Dinas Perhubungan Provinsi NTT yang diuraikan dalam kegiatan program administrasi perkantoran dan program belanja modal yang berorientasi pada kegiatan pembangunan baik penyediaan maupun pengadaan sarana dan prasarana perhubungan di wilayah NTT. Dalam rencana kegiatan ini termasuk didalamnya komponen – komponen pendukung baik berupa Dana, Sumber Daya Manusia, Sarana dan lain – lainnya.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran pembangunan sektor perhubungan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT sebagai berikut :

1. Terwujudnya SDM Aparatur Perhubungan yang berkualitas memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis perhubungan ;
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas ;
3. Meningkatnya mutu dan jumlah sarana prasarana transportasi untuk aksesibilitas dan kelancaran mobilitas orang dan/atau barang;
4. Menurunnya kejadian kecelakaan lalu lintas dan angka fatalitas lalu lintas angkutan;
5. Tersusunnya berbagai regulasi peraturan daerah dan peraturan gubernur untuk peningkatan PAD sektor perhubungan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan merupakan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi.

4. Kebijakan

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang ada, dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas transportasi dengan mempedomani rencana pengembangan transportasi wilayah yang termuat dalam RTRW dan TATRAWIL Provinsi NTT. Sejalan dengan itu, guna mendukung 6 (enam) tekad dan 8 agenda Pemerintah Provinsi NTT, dirumuskan Kebijakan dan Strategi pembangunan sektor transportasi, sebagai berikut :

a. Kebijakan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan dan Kapasitas Kelembagaan, kebijakan ini diarahkan untuk : 1) meningkatkan pengetahuan dan kemampuan (teknis dan fungsional) aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, kursus, bimbingan teknis di bidang perhubungan; 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan, melalui pengembangan data dan informasi sektor perhubungan dan pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor yang memadai.

b. Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi Jalan

Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan transportasi jalan yang selamat, efektif, efisien dan terpadu dalam satu kesisteman melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi jalan dan fasilitas keselamatan dan keamanan lalu lintas jalan serta peningkatan pelayanan angkutan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan.

c. Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi Penyeberangan

Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan lalu lintas angkutan penyebrangan dalam membangun konektivitas antar wilayah/daerah yang efektif, efisien dan terpadu dalam satu kesisteman melalui

pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana fasilitas lalu lintas angkutan penyeberangan serta peningkatan pelayanan angkutan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan.

d. Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi Laut

Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan transportasi laut dalam membangun konektivitas lokal (dalam wilayah kabupaten/kota), regional (lintas kabupaten/kota), nasional (antar provinsi) dan konektivitas internasional (antar negara) yang efektif, efisien dan terpadu dalam satu kesisteman melalui pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut serta peningkatan pelayanan angkutan laut kepada masyarakat pengguna jasa angkutan.

e. Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi Udara

Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan transportasi udara dalam membangun konektivitas regional (antar kabupaten/kota, nasional (antar provinsi) dan konektivitas internasional (antar negara) yang efektif, efisien dan terpadu dalam satu kesisteman melalui pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana fasilitas transportasi udara serta peningkatan pelayanan angkutan udara kepada masyarakat pengguna jasa angkutan.

f. Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi Antar Moda / Multimoda

Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan antar moda transportasi, mengembangkan keterpaduan angkutan jalan, terminal, pelabuhan (laut dan penyeberangan) dan bandar udara dalam suatu pelayanan yang terpadu dan efisien melalui penyediaan sarana angkutan umum yang berkualitas dan pengaturan rute/lintasan pelayanan.

5. Strategi

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang ada maka dirumuskan strategi / cara untuk mewujudkannya :

- a. Strategi Pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur dan kapasitas kelembagaan, meliputi :
 - ❖ Melakukan analisis kebutuhan SDM aparatur dan jenis pelatihan teknis, fungsional dan struktural yang dibutuhkan.
 - ❖ Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait terutama Kementerian Perhubungan terkait penyelenggaraan diklat teknis perhubungan di daerah;
 - ❖ Meningkatkan ketersediaan data dan informasi sektor perhubungan serta sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor yang memadai.
- b. Strategi di bidang pengembangan sistem transportasi jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi :
 - ❖ Peningkatan aksesibilitas antar wilayah dan antar lintas batas negara.
 - ❖ Optimalisasi pelayanan penumpang dan barang antar pusat kegiatan dan peningkatan aksesibilitas dari dan ke pusat - pusat produksi serta kawasan potensial dan strategis lainnya;
 - ❖ Mengembangkan pelayanan angkutan perbatasan dan angkutan lintas batas negara;
 - ❖ Mengembangkan konsep angkutan perdesaan dan keperintisan yang menjamin akses ke seluruh wilayah perdesaan dan wilayah terisolasi terutama desa sasaran Program Desa Mandiri Anggur Merah;
- c. Peningkatan Fungsi dan Pelayanan Jalan.
 - ❖ Menjadikan keselamatan jalan sebagai tujuan utama penyelenggaraan lalu lintas jalan;
 - ❖ Menyeraskan penanganan berbagai moda transportasi jalan terutama menyangkut angkutan umum dan kendaraan tak bermotor;
 - ❖ Mengoptimalkan pelayanan lalu lintas pada seluruh jaringan jalan yang ada melalui sistem informasi/petunjuk arah dan rute yang memadai;
 - ❖ Menyeraskan penataan lalu-lintas dan *traffic management* antar kabupaten/kota;

- ❖ Merumuskan strategi penanganan simpang-simpang pada berbagai jenis simpang yang ada;
 - ❖ Memperkenalkan prinsip-prinsip pembatasan lalu lintas terutama di daerah perkotaan;
 - ❖ Memprakarsai sistem lalu-lintas yang ramah lingkungan dan hemat energi;
 - ❖ Mengendalikan lalu lintas berat dalam rangka melindungi kerusakan prasarana jalan;
 - ❖ Memperkenalkan sistem parkir di kawasan pusat kota dan pusat kegiatan yang efisien.
- d. Pengembangan dan Peningkatan Fungsi Terminal Barang dan Penumpang
- ❖ Pembangunan terminal barang dan penumpang untuk mendukung pergerakan orang dan barang serta mengintegrasikan dengan simpul transportasi lainnya;
 - ❖ Meningkatkan daya tampung kendaraan di setiap terminal;
 - ❖ Pengembangan fasilitas pendukung di setiap terminal;
 - ❖ Meningkatkan akses ke terminal;
 - ❖ Memberikan pelayanan kepada pengguna jaringan jalan agar mendapatkan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan dalam melakukan perjalanan ke/dari suatu wilayah;
- e. Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang dan Barang
- ❖ Mengembangkan konsep angkutan umum di wilayah provinsi meliputi angkutan perkotaan, wilayah (regional) dan perdesaan dalam satu kesatuan pelayanan;
 - ❖ Mengembangkan angkutan regional yang menghubungkan dan memadukan angkutan perkotaan dan perdesaan;
 - ❖ Menyiapkan perumusan tentang terminal, simpul transfer, halte dan bus stop yang aman, nyaman dan mencerminkan budaya lokal;
 - ❖ Menerapkan *Buy The Service* untuk angkutan umum perkotaan dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP);

- ❖ Merencanakan sistem sirkulasi barang dalam suatu jaringan lintas dan fasilitas bongkar muat yang terpadu dengan moda transport lain serta membatasi angkutan barang berat, mengutamakan penggunaan angkutan yang sesuai dengan kemampuan prasarana jalan yang ada.
- f. Strategi di bidang pengembangan sistem transportasi penyeberangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- ❖ Menjadikan angkutan penyeberangan sebagai sarana transportasi lintas pulau kecil untuk penumpang dan barang serta mendukung keterbukaan isolasi wilayah dan mendukung kelancaran distribusi barang produksi dari tiap pulau-pulau kecil yang ada di tiap wilayah;
 - ❖ Mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang menghubungkan pulau-pulau kecil antar wilayah kabupaten/kota dan menghubungkan daerah produksi hasil bumi dengan simpul-simpul transportasi pada daerah yang lebih maju;
 - ❖ Menyediakan dan meningkatkan kualitas moda angkutan kapal penyeberangan yang disesuaikan dengan daya angkut dan daya muat penumpang dan barang pada lalu lintas penyeberangan lintas pulau;
 - ❖ Membangun dermaga penyeberangan serta fasilitas pendukungnya dan mengarahkan pola pengembangan kawasan dermaga, termasuk dermaga/terminal terpadu;
 - ❖ Mengupayakan dan memantapkan keterpaduan layanan penyeberangan dengan moda lain seperti jalan dan terminal.
- g. Strategi di bidang pengembangan sistem transportasi laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka mewujudkan transportasi laut yang andal dan berkemampuan tinggi meliputi
- ❖ Meningkatkan peran armada pelayaran nasional, baik untuk angkutan dalam negeri maupun ekspor-impor dengan memberlakukan azas *cabotage*; Untuk itu diperlukan dukungan perbankan dalam penyediaan kredit murah bagi peremajaan armada;

- ❖ Mengembangkan sarana dan prasarana fasilitas transportasi laut pada daerah/wilayah pelabuhan-pelabuhan yang potensial, strategis dan cepat tumbuh;
 - ❖ Mengurangi bahkan menghapus pungutan-pungutan tidak resmi di pelabuhan, sehingga tarif yang ditetapkan otoritas pelabuhan tidak jauh berbeda dengan biaya yang secara riil dikeluarkan pengguna jasa kepelabuhan, melalui peningkatan koordinasi bagi semua instansi yang terkait dalam proses bongkar muat barang;
 - ❖ Pemenuhan standar pelayanan internasional untuk peningkatan keselamatan pelayaran, baik selama pelayaran maupun saat berlabuh dan bongkar muat di pelabuhan;
 - ❖ Mengembangkan terminal peti kemas/*Dryport* yang lebih efisien, efektif serta berdaya saing guna meningkatkan arus pergerakan barang ekspor dan import dari dan ke luar wilayah Provinsi NTT;
 - ❖ Mengembangkan pelayanan angkutan keperintisan untuk membuka akses pada daerah terpencil /tertinggal yang belum dilayani usaha angkutan komersil.
- h. Strategi di bidang pengembangan sistem transportasi udara di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka mewujudkan transportasi yang andal dan berkemampuan tinggi meliputi :
- ❖ Pengembangan prasarana dan fasilitas bandar udara meliputi *runway*, *taxiway*, apron dan terminal;
 - ❖ Memperkuat simpul bandara dengan mengkombinasikan pelayanan menuju terminal terpadu meliputi : angkutan bus, dan angkutan kota serta mendukung kegiatan komersial dan pariwisata;
 - ❖ Mengembangkan fasilitas kargo, serta fasilitas pemrosesan barang guna meningkatkan nilai tambah komoditas;
 - ❖ Mengembangkan rute penerbangan langsung domestik maupun internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menunjang potensi pariwisata, baik melalui penerbangan reguler maupun *charter*;

- ❖ Mengembangkan pelayanan angkutan keperintisan untuk membuka akses pada daerah terpencil /tertinggal yang belum dilayani usaha angkutan komersil.
- i. Strategi di bidang Transportasi Antarmoda/Multimoda untuk mewujudkan perpaduan moda dan integrasi antar moda angkutan untuk penumpang dan mendukung distribusi barang meliputi :
 - ❖ Mengembangkan konsep angkutan umum di wilayah provinsi meliputi angkutan perkotaan, wilayah (regional) dan perdesaan dalam satu kesatuan pelayanan;
 - ❖ Mengembangkan konsep angkutan perkotaan yang melayani pusat kota dan wilayah aglomasinya yang efisien, ramah lingkungan dan terpadu;
 - ❖ Mengupayakan dan memantapkan keterpaduan moda jalan, terminal dengan dermaga penyeberangan;
 - ❖ Mengembangkan angkutan regional yang menghubungkan dan memadukan angkutan perkotaan dan perdesaan;
 - ❖ Menyiapkan perumusan tentang terminal, simpul transfer, halte dan *bus stop* yang aman dan nyaman;
 - ❖ Mengembangkan keterpaduan angkutan jalan, terminal serta dermaga penyeberangan dan udara dalam suatu pelayanan yang terpadu dan efisien.

6. Program / Kegiatan

- a) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan, dengan kegiatan pokok :
 1. Pengembangan sarana prasarana perhubungan ;
 2. Peningkatan pelayanan perijinan dan pengawasan bidang perhubungan ;
 3. Peningkatan kapasitas aparatur perhubungan ;
 4. Peningkatan koordinasi teknis perhubungan se - Provinsi NTT
- b. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan kegiatan pokok :
 1. Peningkatan mutu pelayanan operator dan moda angkutan;
 2. Manajemen lalu lintas angkutan penumpang, barang dan jasa;
 3. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas;
 4. Monitoring evaluasi dan pelaporan terpadu.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi NTT yang dianggap merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategik adalah dengan mengkaji dan menentukan terlebih dahulu apa yang akan dicapai dan kapan dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 (lima) UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ se- NTT. Untuk itu diperlukan penetapan langkah – langkah yang srategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi NTT. Sejauh ini telah dilakukan penerapan komitmen dari pimpinan puncak terutama dalam menentukan kebijaksanaan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 (lima) UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ se-NTT guna dapat berjalan dengan baik sesuai dengan garisn komitmen yang sudah disepakati. Jabaran dari pada Komitmen tersebut adalah Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 (Lima) UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ se-NTT yang tetap mengacu pada visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya SDM Aparatur Perhubungan yang berkualitas memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis perhubungan	Persentase Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis meningkat	10 %	Rp 297.360.000
		Persentase jumlah tenaga teknis bidang perhubungan meningkat	10 %	
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan SKPD	Jumlah ijin trayek/ijin operasi yang diterbitkan meningkat	1616 ijin	Rp 1.881.485.750
		Persentase peningkatan realisasi pendapatan	100%	
3.	Terwujudnya perencanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas;	Jumlah dokumen perencanaan (Master Plan, FS) pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang disusun	3 dok	Rp 2.351.017.000

		Jumlah Daftar usulan program / kegiatan pembangunan sarana / prasarana fasilitas perhubungan (darat, laut dan udara) Tahun 2020	1 dok	Rp 284.243.500
4.	Meningkatnya mutu layanan dan jumlah sarana prasarana transportasi untuk aksesibilitas dan kelancaran mobilitas orang dan/atau barang;	Jumlah penumpang angkutan penyeberangan meningkat dari 262.356 menjadi 288.537 orang	3%	Rp 400.000.000
		Jumlah sarana angkutan laut (kapal perintis laut) bertambah dari 6 unit/6 trayek menjadi 11 unit/11 trayek	11 unit/11 trayek	Rp 400.000.000
		Jumlah penumpang angkutan udara meningkat dari 2.303.786 menjadi 2.534.164 orang	3%	
		Jumlah pelabuhan Marina yang dibangun	1 buah	
		Jumlah Kapal Angkutan Ternak Tol Laut dari 1 menjadi 4 buah	4 buah	
		Jumlah Terminal Barang Internasional	3 lokasi	
5.	Menurunnya kejadian kecelakaan lalu lintas dan angka fatalitas lalu lintas angkutan;	Prosentase berkurangnya jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas angkutan jalan	10%	Rp 655.397.700
		Persentase menurunnya jumlah korban meninggal	10%	Rp 455.251.500
		Jumlah fasilitas keselamatan lalulintas terpasang meningkat dari 476 M menjadi 792 M (Guard Rail)	792 M	Rp 1.718.173.000
6.	Tersusunnya berbagai regulasi peraturan daerah dan peraturan gubernur untuk peningkatan PAD sektor perhubungan	Jumlah kajian dan peraturan gubernur/peraturan daerah yang dihasilkan	3	Rp. 66.904.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas – tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan Renstra. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Untuk mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan dan diperjanjikan dalam Renstra dan Penetapan Kinerja maka dilakukan pengukuran capaian kinerja dan metode yang digunakan adalah pengukuran kinerja:

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Capaian indikator Kinerja

$$\frac{Rencana - (Realisasi - Rencana)}{Rencana} \times 100\%$$

Atau:

Capaian indikator kinerja

$$\frac{(2 \times Rencana) - Realisasi}{Rencana} \times 100\%$$

Sedangkan metode Penyimpulan Capaian Sasaran dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- ❖ $X \geq 85 \%$: Sangat Berhasil
- ❖ $70 \% \leq X < 85 \%$: Berhasil
- ❖ $55 \% < X < 70 \%$: Cukup Berhasil
- ❖ $X \leq 55 \%$: Belum Berhasil

Dari 5 sasaran strategis yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016 maka hasil capaian pengukuran kinerja sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN 1

**Terwujudnya SDM Aparatur Perhubungan yang Berkualitas
Memiliki Pengetahuan dan Kemampuan Teknis Perhubungan**

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan keamanan, ketertiban dan keselamatan lalu lintas jalan, pelayaran, kepelabuhanan dan perkapalan, pelayanan perijinan (ijin trayek/lintasan, ijin pembangunan kapal di bawah 7 GT dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk rubah bentuk kendaraan). Dalam melakukan kegiatan-kegiatan teknis sangat membutuhkan aparatur yang memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis di bidangnya masing-masing (bidang perhubungan darat, laut).

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan dengan kegiatan – kegiatan : Pelatihan Teknis Bidang

Perhubungan (Pelatihan Teknis Operasional jembatan bergerak Pelabuhan Penyeberangan, Perhubungan Darat/LLAJ, Perhubungan Laut), dengan total anggaran sebesar **Rp.297.360.000,-**

Tabel 3.1

Sasaran Terwujudnya SDM Aparatur Perhubungan Yang Berkualitas Memiliki Pengetahuan dan Kemampuan Teknis Perhubungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target 2018	Capaian 2018	Target Renstra 2018
1	Persentase jumlah tenaga teknis bidang perhubungan meningkat	% (orang)	4% (6 orang)	6 % (10 orang)	7 % (11 orang)	4 orang (100%)	7 orang	7 orang (100%)	10%
2	Persentase jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis meningkat	% (orang)	25,64% (40 orang)	24,18 % (37 orang)	26,60% (30 orang)	0 %	19 orang	19 orang 100%	10%
Rata – rata								100%	

Penjelasan dari pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase tenaga teknis bidang transportasi yang bertambah

Sesuai target Renstra jumlah tenaga teknis bidang transportasi yang memiliki sertifikat untuk melakukan tindakan penyidikan kendaraan di jalan (PPNS bidang perhubungan), uji ukur kapal, tenaga ahli penguji kendaraan ditargetkan meningkat 10% pada setiap tahunnya. Kondisi tahun dasar 2013 hanya 3 orang (tenaga penguji kendaraan). Realisasi tahun 2014 yang dikirim 6 orang (Angkutan Jalan 2 orang, pengoperasian pelabuhan penyeberangan 2 orang, keselamatan tingkat dasar, 2 orang). Jadi jumlahnya s/d 2014 meningkat menjadi 10 orang ditambah dengan tenaga ahli ukur kapal 1 orang (pegawai pindahan dari Pemkab Sikka). Pada tahun 2015 sesuai target Renstra bertambah 10% (15 orang) jumlah tenaga teknis, realisasi yang dikirim 10 orang (biaya dari APBN) karena alokasi dari APBD tidak ada (tidak disetujui waktu pembahasan). Pada tahun 2016 sesuai target Renstra bertambah 10%, namun dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07.2016 tentang penundaan penyaluran sebagian DAU Tahun 2016,

maka kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Perhubungan termasuk dalam kegiatan yang dananya ditunda, sehingga tidak bisa dilaksanakan. Pada tahun 2017 sesuai target Renstra bertambah 10% jumlah tenaga teknis, realisasi yang dikirim adalah 4 orang sesuai target yang ditetapkan tahun 2017, sehingga capaiannya adalah 100%. Pada tahun 2018 target yang ditetapkan adalah sebanyak 7 orang, dan realisasinya adalah 7 orang (diklat PKB dasar 2 orang, diklat kepemimpinan bagi perempuan, diklat pengembangan budaya organisasi, diklat SAR 2 orang, diklat pembentukan pola pikir ASN) sehingga capaiannya adalah 100%

2. Persentase jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis meningkat

Persentase jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis sesuai target Renstra dan Perjanjian Kinerja (PK) meningkat 10% (15 orang) pada tahun 2015, realisasinya 45 orang (Diklat Dasar Transportasi Darat, 10 orang dan pelatihan manajemen operasional pelabuhan penyeberangan, 10 orang dari Dinas Perhubungan Provinsi NTT sisanya 25 orang dari kabupaten/kota dan UPT Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi). Pada tahun 2016 sesuai target Renstra bertambah 10%, namun dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07.2016 tentang penundaan penyaluran sebagian DAU Tahun 2016, maka kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Perhubungan termasuk dalam kegiatan yang dananya ditunda, sehingga tidak bisa dilaksanakan. Jadi capaiannya adalah 0%. Pada tahun 2017 tidak ada diklat dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan karena adanya rasionalisasi anggaran Kementerian Perhubungan RI, sehingga capaiannya 0% untuk tahun 2017. Pada tahun 2018 dari target yang ditetapkan sebanyak 19 orang, terealisasi semuanya sebanyak 19 orang, sehingga capaiannya adalah 100%.

Dengan demikian rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya SDM Aparatur Perhubungan yang berkualitas memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis Perhubungan adalah 100 % atau dikategorikan sangat berhasil.

❖ **Permasalahan :**

Masih kurangnya koordinasi dengan Kementerian Perhubungan (BPSDM) untuk kerjasama (MOU) dengan Pemerintah Provinsi NTT (Badan Diklat Provinsi NTT) dan Dinas Perhubungan untuk penyelenggaraan Diklat yang terpusat di Kupang melalui pembiayaan APBN atau sharing dengan APBD Provinsi NTT. Apabila

dilaksanakan di Kupang semakin banyak peserta yang mengikuti Diklat tersebut dan lebih efisien.

❖ **Solusi :**

Perlu dialokasikan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan Diklat Teknis Bidang Perhubungan dan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPSDM Kementerian Perhubungan untuk penyelenggaraan Diklat terpusat di Kupang. Untuk jangka panjang mengingat Provinsi NTT merupakan salah satu Provinsi Kepulauan secepatnya merealisasikan pembangunan Balai Diklat Pelayaran kampus NTT di Kupang asalkan Pemerintah daerah menyiapkan lahan., yang sesuai DED berlokasi di Bolok.

SASARAN 2

Meningkatnya kinerja pelayanan SKPD

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan program/kegiatan dan anggaran yang dialokasikan, apa yang direncanakan dapat terserap dan berdampak kepada masyarakat. Disamping itu, sektor perhubungan sebagai salah satu sektor penghasil PAD untuk melakukan langkah-langkah strategis peningkatan penerimaan dari sektor perhubungan, minimal mencapai target yang ditetapkan. Program yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan dengan kegiatan – kegiatan : Pembinaan teknis kepada UPT Perijinan & Pengawasan LLAJ, Operasi pemeriksaan kendaraan bersama instansi terkait, Inventarisasi dan pendataan subyek retribusi, pengawasan terhadap kelaikan kendaraan bermotor (*Ramchek*) dengan total anggaran sebesar Rp. 1.881.485.750,-

Tabel 3.2
Meningkatnya Kinerja Pelayanan SKPD

NO	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN				Target 2018	Capaian 2018	Renstra 2018
			2014	2015	2016	2017			
1	Jumlah ijin trayek/ijin operasi yang diterbitkan meningkat	ijin	751	751	923	933 ijin	1616 ijin	1.643 ijin	523 ijin
2	Persentase realisasi pendapatan meningkat	%	93,15	103,25	110%	100%	100%	96.78%	110%
3	Persentase realisasi belanja meningkat	%	95,93%	88,15%	100%	100%	100%	93.27%	100%
		Rata – rata						97.67%	

Penjelasan dari pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Jumlah ijin trayek/ijin operasi yang diterbitkan meningkat

Jumlah ijin trayek yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (1.616 ijin) lebih tinggi dari target jumlah ijin trayek dalam RPJMD & Renstra yaitu 523 ijin. Jumlah ijin trayek yang dihasilkan sampai dengan Desember 2018 adalah sebanyak 1.643 ijin trayek dan capaiannya 102%.

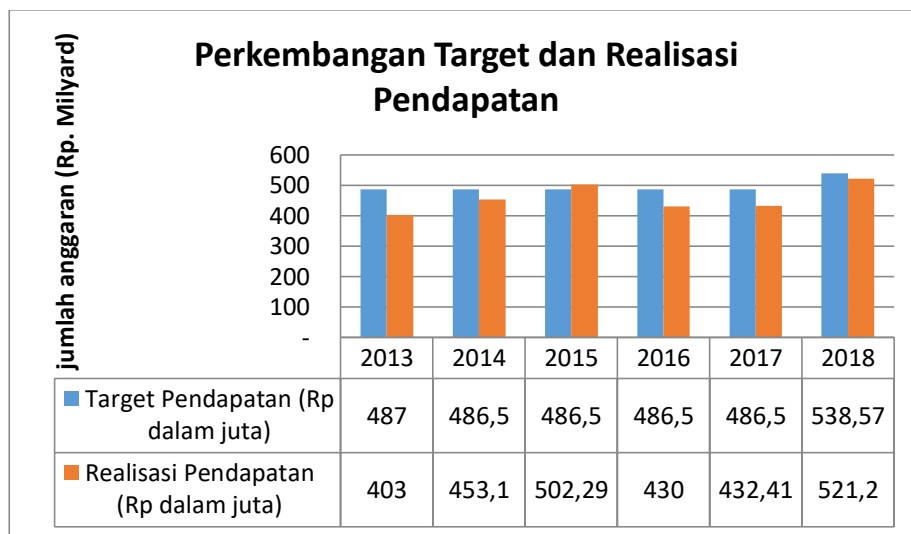
2. Persentase realisasi pendapatan meningkat

Sektor Perhubungan merupakan salah satu sektor sumber Pendapatan Asli Daerah, melalui beberapa obyek retribusi yaitu : Retribusi Jasa Umum (Pengujian Kendaraan Bermotor), Retribusi Perijinan Tertentu (Retribusi Izin Trayek AKDP), Retribusi Terminal. Dasar hukum pelaksanaan yaitu Perda Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Trayek, Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Pergub Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Ijin Trayek, Retribusi Jasa Umum Dan Retribusi Jasa Usaha.

Target realisasi pendapatan Tahun 2018 adalah 110% (sesuai Renstra dan Perjanjian Kinerja), dengan realisasi s/d Desember 96.78%.

Perkembangan target dan realisasi pendapatan sektor perhubungan Tahun 2013 s/d 2018 sebagaimana pada Gambar 3.1 berikut ini.

Gambar 3.1 Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Sektor Perhubungan Tahun 2014 s/d 2018



Pada tahun 2017 dengan besaran target yang sama seperti tahun 2014 , 2015 dan 2016 yaitu sebesar Rp. 486.475.000, realisasi 2013 mencapai Rp. 401.672.500 (82,57%), tahun 2014 realisasi sebesar Rp.453.137.200 (93,15%), pada tahun 2015 melampaui terget yang telah ditetapkan yaitu sebesar 103,25%, realisasi tahun 2016 sebesar Rp. 429.717.500 (88,33%), pendapatan tahun 2017 adalah sebesar Rp. 432.513.500 atau (88,91%). Pada tahun 2018 target penerimaan sebesar Rp. 538.575.000, dan realisasi s/d Desember adalah sebesar 96.78%.

4. Persentase realisasi belanja meningkat

Target realisasi belanja tahun 2018 sebesar 100% (sesuai Renstra dan Perjanjian Kinerja), dengan realisasi s/d Desember adalah 93.27%.

Dengan demikian rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan PD adalah 97.67 % atau dikategorikan sangat berhasil.

❖ **Permasalahan :**

- 1) Khusus untuk pendapatan, realisasi s/d Desember mencapai 96.78% disebabkan karena UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ yang tidak bisa melakukan uji mutu kendaraan, karena di UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ belum memiliki SDM yang memiliki kualifikasi sebagai penguji kendaraan bermotor, selain itu ada salah satu ijin yang dihapus yaitu ijin insidentil sehingga sehingga berpengaruh pada penerimaan.
- 2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas bagi 5 (lima) UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ Wilayah Kupang, Belu, Sikka, Sumba dan Manggarai. Sampai saat ini UPT belum memiliki kantor sendiri, tidak ada kendaraan roda 4 untuk operasional untuk menjangkau seluruh wilayah kerja yang ada termasuk biaya pemondokan untuk pegawai yang rata-rata rumah pribadi dan keluarganya berada di Kupang.
- 3) Untuk Belanja, realisasi belanja hanya mencapai 93.27% disebabkan ada 2 kegiatan yang batal dilaksanakan karena ketiadaan biaya perjalanan dinas dari peserta daerah untuk menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTT di Kupang. Selain 2 kegiatan tersebut, terdapat sisa dana dari belanja langsung dan belanja tidak langsung yang tidak dapat dipakai.

❖ **Solusi :**

- 1) Pendapatan, melakukan langkah-langkah strategis untuk mencari sumber-sumber retribusi bagi peningkatan penerimaan dari sektor perhubungan.
- 2) Perlu alokasi anggaran yang memadai serta sarana dan prasarana bagi seluruh UPT P2 LLAJ se-NTT sehingga dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan meningkatkan PAD.
- 3) Belanja, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran agar sesuai waktu yang direncanakan, termasuk percepatan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

SASARAN 3

Terwujudnya perencanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas.

Sasaran ini diharapkan agar perencanaan pembangunan sektor perhubungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat, terkini dan dapat dipertanggungjawabkan yang berguna untuk pengambilan kebijakan, perumusan program dan kegiatan sektor perhubungan (darat, laut dan udara) sehingga tepat sasaran dan lokasi serta bermanfaat untuk aksesibilitas, mobilitas orang dan barang, pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM.31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Tahapannya Pra Design, Design, Kontruksi). Data menyangkut ketersediaan dan kebutuhan sarana/prasarana dan fasilitas perhubungan yang tersebar di Kabupaten/Kota se-NTT. Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah kegiatan : Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan, kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan, Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan se-Provinsi NTT, FGD Evaluasi Penyelenggaraan Transportasi di NTT, Survey Sarana Dan Prasarana Perhubungan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu, dengan total anggaran sebesar Rp.3.339.195.000,-

Tabel 3.4

Terwujudnya perencanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas.

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target 2018	Capaian (%)	Target Renstra 2018
1.	Jumlah dokumen Perencanaan (FS,SID) pemb.sarana prasarana transportasi darat, laut dan udara yang disusun.	Dok	6 Dok, 36 buku	15 dok	15 dok	3 Dok	100 %	15 Dok
2.	Tersedianya data sarana dan prasarana fasilitas perhubungan yang up to date (terkini)	Dok	1 Dok, 5 buku	9 kab, 1 Dok, 10 buku	15 Kab, 1 Dok, 10 buku	1 Dok	100%	1 Dok
3.	Tersedianya daftar usulan program / kegiatan pembangunan sarana / prasarana fasilitas perhubungan (darat, laut dan udara) Tahun 2019	Keg / Dok	1 Dok 5 buku	1 Dok 10 buku	1 Dok 10 buku	1 Dok	100 %	1Dok
4.	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan pembangunan sarana / prasarana perhubungan di Provinsi NTT	Dok	5 Dok, 20 buku	2 kali keg, 1 Dok, 5 buku	1 kali keg, 1 Dok,	1 Dok	100%	5Dok
Total							100%	

Penjelasan dari pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan melalui dana APBD Provinsi NTT telah dilakukan Master Plan Pembangunan Pelabuhan Laut Oepoli, FS Bandar Udara Boking Kab. TTS, FS Pelabuhan Laut Maubesi Kabupaten Malaka.
2. Tersedianya data sarana dan prasarana fasilitas perhubungan, berupa Buku Profil Perhubungan/Perhubungan Dalam Angka Tahun 2018 dan Website Perhubungan (www.dishub.nttprov.go.id), 1 dokumen (10 buku). Diharapkan dengan adanya *website* ini masyarakat dan dunia usaha dapat mengakses data dan informasi pembangunan sektor perhubungan di NTT serta berbagai peraturan di bidang perhubungan termasuk persyaratan perijinan (ijin trayek, rubah bentuk, ijin pembangunan kapal, trayek/lintasan, pembangunan pelabuhan dan lain sebagainya). Buku Profil Perhubungan/Perhubungan Dalam Angka Tahun 2018 merupakan *updating* profil perhubungan tahun 2018 (dalam bentuk data *time series* beserta analisisnya). Capaian indikator ini 100%. Apa yang direncanakan terlaksana semuanya.

Kinerja (hasil/keluaran) pelaksanaan pembangunan sarana/prasarana dan fasilitas perhubungan darat, laut dan udara tahun 2018 (sumber dana APBD dan APBN) adalah sebagai berikut :

1) Sarana & Prasarana Transportasi Darat (Lalu Lintas Angkutan Jalan)

Sumber Dana APBN :

- Subsidi Operasi Bus Perintis DAMRI stasiun Kupang, Kefamenanu, Ende dan Waingapu. Jumlah trayek/lintasan pelayanan perintis yaitu 33 (tiga puluh tiga). Trayek/lintasan terdiri dari : Stasiun Kupang 10 trayek/lintasan, Stasiun Kefamenanu 8 trayek/lintasan, Stasiun Ende 8 trayek/lintasan, dan Stasiun Waingapu 7 trayek/lintasan.

Tabel 3.5. Jumlah Stasiun DAMRI dan Trayek Keperintisan Tahun 2018

No	Stasiun DAMRI	Trayek
1.	Stasiun Kupang	10 trayek
2.	Stasiun Kefamenanu	8 trayek
3.	Stasiun Ende	8 trayek
4.	Stasiun Waingapu	7 trayek

Sumber : Hasil Olahan Dinas Perhubungan Provinsi NTT

2) Sarana & Prasarana Transportasi Darat (Lalu Lintas Angkutan Penyeberangan)

Sumber Dana APBN :

- Untuk membuka keterisolasian wilayah di NTT dialokasikan program/kegiatan Subsidi angkutan perintis penyeberangan. Saat ini Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah memiliki 11 (empat belas) armada angkutan penyeberangan, dengan rincian : 3 unit Kapal Perintis Penyeberangan yang dikelola oleh BUMD : PT. Flobamor Kupang yaitu : KMP. Pulau Sabu, KMP. Ile Boleng dan KMP Sirung. Sedangkan milik PT.ASDP Indonesia Ferry Cabang Kupang, 8 (delapan) unit Kapal Motor Penyeberangan, yaitu : KMP. Ile Mandiri, KMP. Namparnos, KMP. Ile Ape, KMP. Uma Kalada, KMP. Ranaka, KMP. Ine Rie II, KMP Ile Labalekan, KMP. Lakaan yang melayani wilayah/daerah antar Kabupaten/Kota di NTT dengan lintasan pelayanannya masing-masing dan 2 (unit) Kapal ternak Cemara Nusantara I dan Cemara Nusantara 5.

3) Sarana & Prasarana Transportasi Laut

Pelaksanaan pembangunan sarana/prasarana perhubungan laut yang dilakukan pada Tahun 2018 ini, yaitu:

Sumber Dana APBN

- Untuk menghubungkan wilayah/daerah tertinggal/terpencil dan daerah perbatasan di Nusa Tenggara Timur sudah dilayani dengan rute pelayanan

angkutan Perintis Laut. Dalam kurun waktu 2013 – 2018 5 (lima) tahun, terjadi peningkatan pelayanan keperintisan laut melalui penambahan 11 (sebelas) armada Kapal Perintis serta penambahan lokasi pangkalan yaitu Pangkalan Kupang, Maumere dan Waingapu sehingga jarak tempuh dan lama hari suatu trayek/lintasan semakin pendek. Dimana sebelumnya lama hari perjalanannya hingga mencapai 21 (dua puluh satu) hari sekarang menjadi 12 (dua belas) hari bahkan ada yang 7 (tujuh) hari. Di Provinsi NTT saat ini memiliki 11 (sebelas) unit Kapal Angkutan Laut Perintis.

Sumber dana APBD:

- Master Plan Pembangunan Pelabuhan Laut Oepoli (Kabupaten Kupang), Pelabuhan Laut Maubesi Hasan Kabupaten Malaka.
- ✓ Terlaksananya rapat koordinasi teknis perhubungan se - NTT
 - ❖ Tersedianya daftar usulan rencana program dan kegiatan pembangunan sektor perhubungan Tahun Anggaran 2020 (sumber dana APBD dan APBN).
 - ❖ Tersedianya rekomendasi hasil pelaksanaan Rakornis Perhubungan Tahun 2018. Rakornis dilaksanakan 1 kali selama 3 hari di Kota Kupang, yang diikuti oleh jajaran Perhubungan se-NTT di Kupang (Dinas Perhubungan Kab/Kota se NTT dan 5 UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ, Kantor Unit Penyelenggara Bandar



Udara se-NTT (14 Bandara), Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP: 5 KSOP), Kantor Unit Penyelenggara (KUPP : 9 KUPP), PT. Pelni, ASDP, PD. Flobamor, Distrik Navigasi, Pelindo,

BMKG, SAR, BPTD Wilayah XIII, Angkasa Pura, DPD Organda, DPC Organda se NTT dan DPC Pelayaran Rakyat. Capaian kegiatan ini 100%.

- ✓ Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan pembangunan sarana / prasarana perhubungan di Provinsi NTT.
- Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan terpadu adalah rekapan seluruh laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sarana/prasarana perhubungan

(penyeberangan, laut, udara), untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan. Capaian kegiatan ini adalah 100 %.

Dengan demikian rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya perencanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas adalah 100% atau dalam kategori sangat berhasil.

❖ **Permasalahan :**

Anggaran APBD Provinsi NTT belum mampu untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana fasilitas perhubungan, sehingga ketergantungan dengan dana APBN Kementerian Perhubungan sangat tinggi. APBD Provinsi NTT hanya mampu untuk menyediakan berbagai dokumen perencanaan sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan pembangunan fisik sebuah bandara, pelabuhan, terminal, jembatan timbang dan fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Itupun alokasi anggaran APBD yang ada selama belum memadai untuk merealisasikan semua penyusunan dokumen perencanaan (Pra Studi Kelayakan, Study Kelayakan, Master Plan, SID, AMDAL, DED Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan Darat, Laut dan Udara).

❖ **Solusi :**

Menyediakan anggaran yang memadai untuk penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan (Pra Studi Kelayakan, Study Kelayakan, Master Plan, SID, AMDAL, DED Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan Darat, Laut dan Udara).

SASARAN 4

Meningkatnya mutu dan jumlah sarana prasarana transportasi untuk aksesibilitas dan kelancaran mobilitas orang dan/atau barang.

Sasaran ini diharapkan mampu mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas transportasi yang memadai. Program/kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan. Dana ini dikelola langsung oleh

Unit Pelaksana Teknis/Satker Kementerian Perhubungan yang ada di daerah (Bandara & Pelabuhan).

Tabel 3.6

Meningkatnya mutu dan jumlah sarana prasarana transportasi untuk aksesibilitas dan kelancaran mobilitas orang dan/atau barang

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target 2018	Capaian Tahun 2018	Renstra 2018
1.	Jumlah prasarana pelabuhan penyeberangan yang dibangun bertambah	buah	17	18	20	21	22	22/ 100%	22
2.	Jumlah prasarana pelabuhan laut yang dibangun bertambah	buah	50	52	53	56	64	Pel : 97 buah/ 152%	64
3.	Jumlah prasarana bandar udara yang dibangun bertambah	buah	14	15	15	-	18	15/ 83.33%	18
4.	Jumlah sarana angkutan umum darat (jalan)	unit	16.041	19.870	20.883	22.492 / 103%	25.785	23.616/ 91.6%	25.785
5.	Jumlah sarana angkutan penyeberangan bertambah	unit	14	15	16	17/ 100%	18	12/ 66.66%	18
6.	Jumlah sarana angkutan perintis laut bertambah	Trayek/ unit	6 trayek /6 unit	6 trayek/ 6 unit	6 trayek/ 6 unit	6 trayek/ 6 unit	8 trayek/8 unit	11 trayek/ 11 unit 100%	8 trayek/8 unit
7.	Jumlah sarana angkutan perintis udara bertambah	Rute	6	9	9 lintasan	9 lintasan	9 lintasan	5 lintasan	9
8.	Jumlah pelabuhan Marina yang dibangun	-	-	-	-	-	-	1 buah	
9.	Jumlah Kapal Angkutan Ternak Tol Laut	-	-	-	-	-	-	4 buah	

10.	Jumlah Terminal Barang Internasional (Bimoku, Wini, Motaain)	-	-	-	-	-	-	3 lokasi	
11.	Jumlah Terminal Tipe B					15	15	15	
	Rata-rata capaiannya							90.33%	

Penjelasan dari pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Jumlah prasarana angkutan darat yang terdiri dari terminal tipe B sebanyak 15 terminal, jumlah pelabuhan penyeberangan 22 buah, angkutan udara yaitu bandara sebanyak 15 bandara, angkutan laut yaitu pelabuhan sebanyak 97 pelabuhan dari target 64 pelabuhan, pencapaiannya adalah 100%.

Tabel 3.7. Prasarana Perhubungan Tahun 2018

No	Kota/Kabupaten	Prasarana		Prasarana	Prasarana
		Angkutan Darat		Angkutan Laut	Angkutan Udara
		Terminal	Jembatan Timbang	Pelabuhan	Bandara
1	Kota Kupang	5	2	2	1
2	Kab. Kupang	4		5	
3	TTS	2		2	
4	TTU	2		2	
5	Belu	6		1	1
6	Alor	1		14	2
7	Sabu			3	1
8	Lembata	2		3	
9	Flores Timur	4		12	1
10	Sikka	2		9	1
11	Ende	6		5	1
12	Nagekeo	2		1	
13	Rote	3		9	1
14	Ngada	4		4	1
15	Manggarai	4	1	4	1
16	Manggarai Timur	2		4	
17	Manggarai Barat	2	1	6	1
18	Sumba Barat	2		2	1

No	Kota/Kabupaten	Prasarana		Prasarana	Prasarana
		Angkutan Darat		Angkutan Laut	Angkutan Udara
		Terminal	Jembatan Timbang	Pelabuhan	Bandara
19	Sumba Timur	3		8	1
20	Sumba Barat Daya	2		2	1
21	Sumba Tengah			1	
22	Malaka	1			
JUMLAH		56	4	97	15

Dengan demikian capaian sasaran Meningkatnya mutu dan jumlah sarana prasarana transportasi untuk aksesibilitas dan kelancaran mobilitas orang dan/atau barang adalah 80.04% dan dikategorikan berhasil.

❖ **Masalah :**

Keterbatasan dana khususnya sumber dana APBD untuk membiayai pembangunan fisik sarana prasarana dan fasilitas perhubungan (darat, laut dan udara) sehingga selama ini, pemerintah daerah bergantung kepada sumber dana APBN Kementerian Perhubungan.

❖ **Solusi :**


Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat (Kemenehub) agar memberikan dukungan dana untuk pembangunan dan pengembangan sarpras perhubungan di NTT. Disamping itu, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembebasan lahan, penyusunan dokumen perencanaan yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyiapkan itu.

2. Jumlah sarana angkutan

- a. Angkutan umum darat (jalan) yang terdiri dari jenis angkutan Bus, Minibus, Pick Up, Truck dan Damtruck pada tahun 2018 yaitu sebanyak 23.616 dibandingkan tahun 2017 sebanyak 22.492, namun jumlah tersebut sebenarnya tidak mencapai target yang telah ditetapkan di Renstra yaitu sebanyak 25.785, sehingga pencapaiannya hanya sebesar 91.6%.

- b. Dalam kurun waktu Tahun 2013 – 2018 (5 tahun) terjadi penambahan 4 (empat) unit Kapal Baru, untuk pelayanan angkutan perintis Penyeberangan di Provinsi NTT yaitu, **KMP. Sirung** (2013) dan **KMP. Ranaka** (2013), **KMP Ine Rie II** (2014), **KMP. Lakaan** (2016). Saat ini Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah memiliki 11 (sebelas) armada angkutan penyeberangan, dengan rincian : 3 (tiga) unit Kapal Perintis Penyebrangan yang dikelola oleh BUMD : PT. Flobamor Kupang yaitu : KMP. Pulau Sabu, KMP. Ile Boleng dan KMP Sirung. Sedangkan milik PT.ASDP Indonesia Ferry Cabang Kupang, 8 (delapan) unit Kapal Motor penyeberangan, yaitu : KMP. Ile Mandiri, KMP. Namparnos, KMP. Ile Ape, KMP. Uma Kalada, KMP. Ranaka, KMP. Ine Rie II, KMP Ile Labalekan, KMP. Lakaan yang melayani wilayah/daerah antar Kabupaten/Kota di NTT dengan lintasan pelayanannya masing-masing dan 2 (unit) Kapal ternak Cemara Nusantara I dan Cemara Nusantara 5.
- c. Untuk menghubungkan wilayah/daerah tertinggal/terpencil dan daerah perbatasan di Nusa Tenggara Timur sudah dilayani dengan rute pelayanan angkutan Perintis Laut. Dalam kurun waktu 2013 – 2018 5 (lima) tahun, terjadi peningkatan pelayanan keperintisan laut melalui penambahan 11 (sebelas) armada Kapal Perintis serta penambahan lokasi pangkalan yaitu Pangkalan Kupang, Maumere dan Waingapu sehingga jarak tempuh dan lama hari suatu trayek/lintasan semakin pendek. Dimana sebelumnya lama hari perjalanannya hingga mencapai 21 (dua puluh satu) hari sekarang menjadi 12 (dua belas) hari bahkan ada yang 7 (tujuh) hari. Di Provinsi NTT saat ini memiliki 11 (sebelas) unit Kapal Angkutan Laut Perintis.
- Jumlah sarana angkutan laut sesuai usulan trayek/lintasan angkutan perintis laut pada tahun 2018 ini targetnya jumlah armada perintis angkutan laut di NTT 8 trayek (8 unit) kapal, realisasinya sesuai surat keputusan menteri perhubungan tahun 2018 ini, Provinsi NTT hanya mendapat 11 (sebelas) trayek/11 kapal. Jadi capainnya 137 %.

Tabel.3.9. Jaringan trayek dan armada angkutan perintis laut di Provinsi NTT Tahun 2017

Pangkalan Kode Trayek	Nama Kapal/ Ukuran	Jaringan Trayek dan Jarak (Mil)	Jumlah Jarak (Mil)
Kupang : R – 23	KM. Nemberala/ 350 DWT 	Kupang – 72 – Ndao – 64 – Sabu – 24 – Raijua – 69 – Mbaing – 116 – Ende – 6 – Pulau Ende – 38 – Maumbawa – 26 – Waiwole – 21 – Mborong – 112 – Waingapu – 84 – Waikelo – 84 – Waingapu – 112 – Mborong – 21 – Waiwole – 26 – Maumbawa – 38 – Pulau Ende – 6 – Ende – 116 – Mbaing – 69 – Raijua – 24 – Sabu – 64 – Ndao – 72 – Kupang.	1, 264
Kupang : R – 24	KM.Sabuk Nusantara 49/GT.2000	Kupang – 64 – Naikliu – 51 – Wini – 105 – Lirang – 82 – Kisar – 15 – Romang – 26 – Leti – 10 – Moa – 28 – Lakor – 41 – Luang P. Kelapa – 13 Sermata (Elo) – 42 – Tapa – 128 – Saumlaki – 128 – Tapa – 42 – Sermata (Elo) – 13 – Luang P. Kelapa – 41 – Lakor – 28 – Moa – 10 – Leti – 26 – Romang – 15 – Kisar – 82 – Lirang – 105 – Wini – 51 – Naikliu – 64 – Kupang.	1,210
Kupang : R – 25	KM. Nangalala/ 350 DWT	Kupang – 131 – Mananga – 24 – Lewoleba – 40 – Balauring – 68 – Baranusa – 45 – Kalabahi – 64 – Atapupu – 64 – Kalabahi – 45 – Baranusa – 68 – Balauring – 40 – Lewoleba – 24 – Mananga – 131 – Kupang.	744
Kupang : R – 26	KM. Negara/ 1200 GT	Kupang – 131 – Mananga – 63 – Maumere – 54 – Marapokot – 57 – Reo – 52 – Labuan Bajo – 76 – Bima – 76 – Labuan Bajo – 52 – Reo – 57 – Marapokot – 54 – Maumere – 63 – Mananga – 131 – Kupang.	866
Kupang : R – 108	KM. Negara/ 2000 GT	Kupang – 99 – Kalabahi – 191 – Lirang – 55 – Iliwaki – 38 – Arwala – 30 – Kisar – 33 – Leti – 11 – Moa – 25 – Lakor – 45 – Mahaleta – 44 – Tapa – 23 – Dai – 25 – Dawera/Dawelor – 13 – Kroing – 18 – Marsela – 89 – 89 – Saumlaki – 89 – Marsela – 18 – Kroing – 13 – Dawera - /Dawelor – 25 – Dai – 23 – Tapa – 44 – Mahaleta – 45 – Lakor – 25 – Moa – 11 – Leti 33 – Kisar – 30 – Arwala – 38 – Iliwaki	

		– 55 – Lirang – 191 – Kalabahi – 99 – Kupang	
Maumere : R – 27	KM. Negara/ 1200 GT	Maumere – 123 – Larantuka – 12 – Waiwerang – 20 Lewoleba – 40 – Balauring – 68 – Baranusa – 45 – Kalabahi – 72 – Maritaing – 56 – Atapupu – 132 – Kupang – 132 – Atapupu – 56 – Maritaing – 72 – Kalabahi – 45 – Baranusa – 68 – Balauring – 40 – Lewoleba – 20 – Waiwerang – 12 – Larantuka – 123 – Maumere.	1,136
Maumere: R – 28	KM. Negara/ 1200 GT	Maumere – 39 – Palue – 54 – Maurole – 50 – Marapokot – 57 – Reo – 52 – Labuan Bajo (PP) – 76 – Bima – 76 – Labuan bajo – 52 – Reo – 57 – Marapokot – 50 – Maurole – 54 – Palue – 39 - Maumere	698
Maumere: R – 97	KM. Negara/ 2000 GT	Maumere – 168 – Selayar – 55 – Bulukumba (Tanjung Bunga) – 100 – Makasar (Paotere) – 69 – Pare-pare – 69 - Makasar (Paotere) – 100 – Bulukumba – 55 - Selayar – 168 – Maumere	784
Maumere: R – 109	KM. Negara/ 2000 GT	Maumere – 53 – Batutua – 73 – Wakatobi – 107 – Kendari – 168 – Kolonedale – 168 – Kendari – 107 – Wakatobi – 73 – Batutua – 163 – Maumere	1022
Waingapu R-103	KM. Negara/ 2000 GT	Waingapu – 53 – Mamboro – 27 – Waikelo – 97 – Bima – 102 – Badas – 46 – Kayangan – 111 – Benoa – 111 – Badas – 102 – Bima – 97 – Waikelo – 27 – Mamboro - 53 – Waingapu	872
Waingapu R-104	KM. Negara/ 2000 GT	Waingapu – 76 – Baing – 24 – Salura – 87 – Rajua – 24 – Seba – 64 – Ndao – 72 – Kupang – 138 – Ende – 69 – Mborong – 53 – Waingapu	607

Selain itu untuk sarana angkutan komersil (Kapal PELNI), yang melayani NTT ada 4 kapal yaitu ; KM. Bukit Siguntang, KM.Usmini, KM.Awu, KM.Wilis,



d. Jumlah sarana angkutan udara, Target tahun 2018

adalah 9 (sembilan) rute penerbangan, realisasinya dari yang kita usulkan adalah 5 (lima) rute penerbangan perintis tahun anggaran 2018 di Provinsi NTT. Adapun rute penerbangan perintis tersebut adalah Kiser - Kupang, Atambua – Alor, Waingapu –

Ruteng, Sabu - Waingapu, Sabu – Ende. Semua rute penerbangan perintis udara ini dilayani oleh maskapai penerbangan Susi Air (Cassa 208). Disamping itu, untuk komersilnya dilayani oleh 9 (sembilan) maskapai penerbangan, yaitu Garuda Indoensia Airline, Lion Airlines, Wings Air, Sriwijaya Airline, Trans Nusa Air Service, City Link, Batik Air, NAM Air, Susi Air yang melayani wilayah Kabupaten/Kota di NTT dan luar wilayah NTT sesuai dengan rute penerbangan masing-masing.

Tabel 3.10. Data Prasarana dan Fasilitas pada 14 Bandara di Provinsi NTT Tahun 2018

No	Bandar Udara	Kelas Banadara	Runway (M2)	Kemampuan	Taxi Way (M ²)	Aprpon (M ²)	Terminal (M ²)
1	EL TARI / KUPANG	I	2500 x 45	B 737 – 900, BOING - 900 ER, AIRBUS A.320	202,5 X 23 x 2	405 X 105	5.045
2	FRANSEDA / MAUMERE	II	2250 x 30	B - 737 – 500-800	84 X 30	200 X 120	3000
3	UMBU MEHANG KUNDA / WAINGAPU	II	1850 x 30	B - 737 - 300	102 X 23	150 X 80	2000
4	FRANS SALES LEGA / RUTENG	III	1500 x 30	ATR 72	75 X 18	131 X 55	1000
5	TAMBOLAKA / WAIKABUBAK	II	2400 x 45	B - 737 – 900, 500-800	100 X 18	144 X 80	4250
6	H.H. AROEBOESMAN / ENDE	II	1650 x 30	ATR 72	75 X 15	175 X 40	1350
7	KOMODO / LABUAN BAJO	II	2150 x 45	B - 737 – 900, 500-800	100 X 18	120 X 60	3000
8	SO'A / BAJAWA	III	1600 x 30	ATR 72	75 X 15	60 X 40	1000
9	MALI / ALOR	III	1600 x 30	ATR 72	75 X 15	120 X 60	1000
10	A.A. BERE TALLO / ATAMBUA	III	1450 x 30	ATR 72	75 X 15 x 2	140 X 80	1000
11	GEWAYANTANA / LARANTUKA	III	1600 x 30	ATR 72	37 X 18	97 X 40	1000
12	D.C. SAUDALE / ROTE	III	1650 X 30	ATR 72	75 X 15	40 X 60	1000
13	TARDAMU / SABU	III	900 X 23	Cassa 208	75 X 15	40 X 60	500

14	WUNOPITO / LEWOLEBA	III	1600 X 30	ATR 72,Cassa 208	53,5 X 15	50 X 90	1000
15	KABIR-PANTAR (ALOR)						

SASARAN 5

Menurunnya kejadian kecelakaan lalu lintas dan angka fatalitas lalu lintas angkutan

Sasaran ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan dan keamanan lalu lintas angkutan jalan, pelayaran dan penerbangan, serta menurunnya angka kejadian kecelakaan dan korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas.

Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah operasi bersama instansi terkait, Pelaksanaan Lomba Tata Tertib Lalu Lintas atau Wahana Tata Nugraha (WTN) tingkat Provinsi NTT, Sosialisasi angkutan orang dalam trayek, Pemeriksaan kelaikan alat – alat keselamatan kapal motor penyeberangan (KMP), Terpilihnya Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT), Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan dengan didukung anggaran sebesar Rp.427.956.700,-

Tabel. 3.10

Menurunnya kejadian kecelakaan lalu lintas dan angka fatalitas lalu lintas angkutan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Renstra 2018
1.	Jumlah prasarana dan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan bertambah	Buah, meter, unit	Rambu : 1702 bh	Rambu : 406 bh	Rambu : 3.408 bh	-	-	167.05 %	Rambu : 2040 buah
			Marka : 2000m	Marka : 2250m	Marka : 27.260 m	-	-	2.67%	Marka : 1.019.585 m
			Guard rail : 200m	Guard rail : 380m	Guard rail : 1.940	Guard rail : 2.416 m/ 100%	Guard rail 14.917 M	3208 M/ 21.51%	Guard rail :14.917

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Renstra 2018
2.	jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas angkutan jalan berkurang	Jumlah Kejadian	982/ (23,52 %)	863/	1.208	1.329	476	1.342	476 (10%)
Rata – rata								47.92%	

Penjelasan dari pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

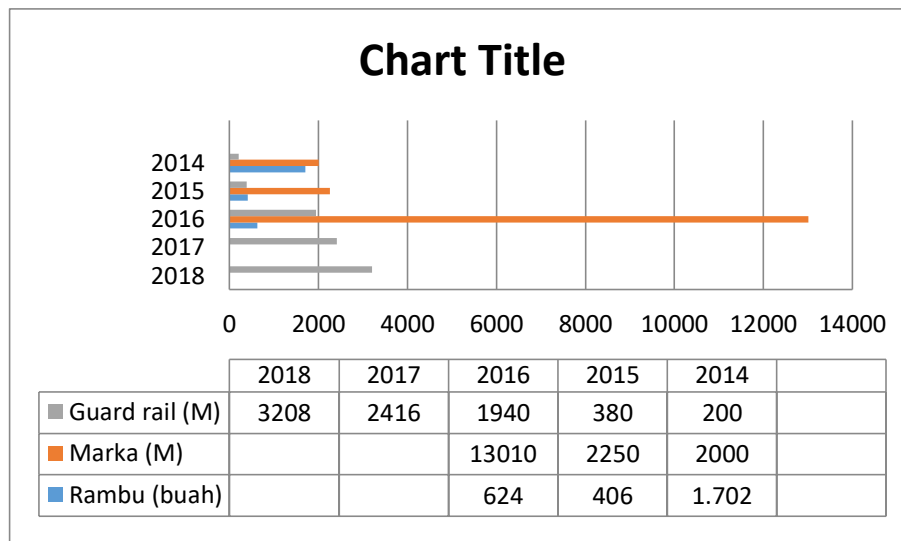
1. Indikator jumlah sarana prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas meningkat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rambu lalu lintas; target jumlah rambu yang terpasang sampai dengan akhir tahun perencanaan (Tahun 2018) adalah sebanyak 2.040 buah rambu lalu lintas. Namun pada tahun 2016 jumlah rambu yang terpasang sudah mencapai 3.408 buah (167,05%) dan sudah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD sehingga pada tahun 2017 dan tahun 2018 ini tidak dianggarkan pemasangan rambu lalu lintas.
 - b. Marka jalan; target pengecatan marka jalan di ruas jalan Provinsi sampai dengan akhir tahun perencanaan (Tahun 2018) adalah sepanjang 1.019.585 M. Pada Tahun 2016 realisasi pengecatan marka jalan baru mencapai 25.626 M (2,67%). Selisih marka jalan yang belum terealisasi seharusnya dilaksanakan pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, namun karena adanya rasionalisasi anggaran Dinas Perhubungan Provinsi NTT maka pengecatan marka jalan tersebut tidak bisa dilaksanakan.
 - c. Pagar pengaman jalan (guardrail); target pagar pengaman jalan yang terpasang pada ruas jalan Provinsi sampai dengan akhir tahun perencanaan (Tahun 2018) adalah sebanyak 14.917 M, realisasi sampai dengan Desember 2018 sebanyak 3.208 M (21,51%). Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi sehingga jumlah pagar pengaman jalan yang di pasang disesuaikan dengan kondisi keuangan.
- Jadi rata-rata pencapaian untuk indikator jumlah fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi sampai dengan Desember adalah 63.89% atau dikategorikan cukup berhasil.

Tabel 3.11. Perkembangan Jumlah Fasilitas Keselamatan (Ruas Jalan Provinsi) Yang Tersebar di Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2009 s/d 2018

No	Fasilitas Keselamatan	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan (Ruas Jalan Provinsi)/Tahun										Total
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Rambu Lalulintas (Buah)	300	100	-	-	275	1.703	406	624	-		3.408
2	Guardrail (Meter)	-	-	-	-	72	200	380	792	476	792	3.208
3	Marka (Meter)	-	15.000	10.000	-	10.000	2.000	2.250	13.010	-		27.260
4	APILL/Traffic Light (Unit)	2	-	1	-	-	-	-	-	-		3
5	RPPJ (Buah)	-	-	-	-	-	-	-	2	-	24	26
6	Zona Zelamat Sekolah (Lokasi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
7	Warning Light	-	-	-	-	6	-	-	-	-		6
8	Delineator (Buah)	-	-	-	-	20	-	-	-	-		20
9	Lampu Penerangan Jalan Umum - LPJU (Buah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
10	Paku Marka (Buah)	-	-	-	-	623	-	-	-	-		623
11	Cermin Tikung (Buah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

Grafik 3.4. Pertumbuhan fasilitas keselamatan tahun 2014-2018



2. Jumlah angka kecelakaan kendaraan bermotor ditargetkan tahun 2018 turun menjadi 476 kejadian (sesuai RPJMD & Renstra). Untuk data kejadian kecelakaan tahun 2018 (Data dirilis Polda NTT), jumlah kejadian kecelakaan mencapai 1.342 kejadian. Hal ini sangat jauh dari target yang ditetapkan.

❖ **Masalah :**

Keterbatasan pembiayaan Dana APBD untuk melakukan sosialisai kepada masyarakat terkait dengan keselamatan lalu lintas di darat, laut termasuk dengan pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan.

❖ **Solusi :**

Perlu alokasi anggaran untuk melakukan sosialisai terkait dengan keselamatan lalu lintas di darat, laut kepada masyarakat.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sektor Perhubungan merupakan salah satu sektor sumber Pendapatan Asli Daerah, melalui beberapa obyek retribusi yaitu : Retribusi Jasa Umum (Pengujian Kendaraan Bermotor), Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : sewa rumah dinas 2 unit), Retribusi Perijinan Tertentu (Retribusi Izin Trayek AKDP), Retribusi Terminal. Dasar hukum pelaksanaan yaitu Perda Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Trayek, Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Pergub Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Ijin Trayek, Retribusi Jasa Umum Dan Retribusi Jasa Usaha.

Berdasarkan ketiga Perda ini, Dinas Perhubungan Provinsi NTT diberikan target PAD, yang mana dalam penetapannya memperhatikan obyek dan potensi yang ada pada masing-masing UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ (5 UPT) dan SKPD Dinas Perhubungan Provinsi NTT. Target PAD Tahun Anggaran 2018 untuk sektor perhubungan sebesar : Rp. 538.575.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar : Rp. 521.249.000,- (97%). Realisasi desember hanya mencapai 97% disebabkan karena UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ yang tidak bisa melakukan uji mutu kendaraan karena di UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ belum memiliki SDM yang memiliki kualifikasi sebagai penguji kendaraan bermotor, selain itu ada salah satu ijin yang di hapus yaitu ijin insidentil sehingga sehingga berpengaruh pada penerimaan. Total anggaran Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 26.935.525.850 dengan realisasi sebesar Rp. 25.123.649.846,- (93.27%) sisa dana sebesar Rp. 1.811.876.054,- (6.73%), yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan Pegawai, Tambahan Penghasilan dan Insentif Pemungutan Retribusi) sebesar Rp. 12.393.009.000,- dengan realisasi sebesar Rp 11.295.422.650,- (91%) dan sisa dana sebesar Rp. 1.097.586.350,- (9%). Belanja Langsung sebesar Rp. 14.542.516.900,- dengan realisasi sebesar Rp13.828.227.196,- (95 %) dan sisa dana sebesar Rp. 714.289.704,- (5%). Realisasi belanja hanya mencapai 93.27% karena ketiadaan biaya perjalanan dinas dari peserta daerah untuk menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTT di Kupang. Selain 2 kegiatan

tersebut, ada sisa dana dari belanja langsung dan belanja tidak langsung yang tidak dapat dipakai.

Alokasi Anggaran untuk SKPD Dinas Perhubungan Provinsi NTT (sumber dana APBD) dalam 2 tahun terakhir ini cenderung mengalami penurunan.

Sumber dana yang mendukung pembiayaan kegiatan – kegiatan pada Dinas Perhubungan dalam Tahun Anggaran 2018 bersumber dari APBD I (DAU), terdiri dari:

Belanja Langsung

Jumlah Belanja Langsung (Rutin dan Urusan Wajib) sebesar Rp 14.542.516.900. Belanja Langsung terdiri dari :

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.230.994.950,-
- 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 10.035.338.390
- 3) Belanja Modal, sebesar Rp. 3.276.183.460,-

Tabel 3.12. Rincian Realisasi Program/Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018

Kode	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Dana			Sisa Dana (RP)
			Rp.	% Keu	% Fisik	
	TOTAL BELANJA	26.935.525.900	25.123.649.846	93,27%	93,27%	1.811.876.054
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.393.009.000	12.091.367.545	97,57%	97,57%	301.641.455
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan Pegawai	9.592.729.200	8.661.140.060	90,29%	90,29%	931.589.140
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS (Kesra)	2.784.122.550	2.623.353.500	94,23%	94,23%	160.769.050
5.1.1.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	16.157.250	10.929.090	67,64%	67,64%	5.228.160
5.2	BELANJA LANGSUNG	14.542.516.900	13.828.227.196	95,09%	95,09%	714.289.704
07.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.331.688.990	2.165.982.523	92,89%	92,89%	165.706.467

01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	79.659.300	72.891.233	91,50%	91,50%	6.768.067
01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	291.120.000	211.013.590	72,48%	72,48%	80.106.410
01.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	14.900.000	-	0,00%	0,00%	14.900.000
01.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	32.420.000	28.495.800	87,90%	87,90%	3.924.200
01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	625.000.000	619.081.200	99,05%	99,05%	5.918.800
01.08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	179.357.000	174.370.200	97,22%	97,22%	4.986.800
01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	76.721.000	73.049.500	95,21%	95,21%	3.671.500
01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.797.000	56.450.350	99,39%	99,39%	346.650
01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	28.437.164	23.188.200	81,54%	81,54%	5.248.964
01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.890.000	12.595.000	66,68%	66,68%	6.295.000
01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	108.840.000	93.684.450	86,08%	86,08%	15.155.550
01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	230.000.000	224.600.660	97,65%	97,65%	5.399.340
01.19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	12.500.000	12.499.200	99,99%	99,99%	800

01.21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	241.160.000	237.877.998	98,64%	98,64%	3.282.002
01.31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	301.800.000	295.157.750	97,80%	97,80%	6.642.250
01.49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	34.087.204	31.027.392	91,02%	91,02%	3.059.812
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.177.437.650	1.151.317.799	97,78%	99,86%	26.119.851
02.03	Pembangunan Gedung Kantor	244.714.400	243.578.000	99,54%	99,54%	1.136.400
02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	84.148.700	68.444.400	81,34%	81,34%	15.704.300
02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	135.445.000	135.415.000	99,98%	99,98%	30.000
02.10	Pengadaan Mebeleur	25.491.000	23.421.000	91,88%	91,88%	2.070.000
02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	592.288.550	589.809.100	99,58%	99,58%	2.479.450
02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	57.050.000	54.595.299	95,70%	95,70%	2.454.701
02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	18.500.000	16.335.000	88,30%	88,30%	2.165.000
02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	19.800.000	19.720.000	99,60%	99,60%	80.000
06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN	24.038.000				

	KINERJA DAN KEUANGAN					
06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.038.000	23.856.000	99,24%	99,24%	182.000
15	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS PERHUBUNGAN	8.970.884.060	8.514.352.204	94,91%	94,91%	456.531.856
15.01	Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan	6.349.185.810	6.113.898.760	96,29%	96,29%	235.287.050
15.02	Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pengawasan Bidang Perhubungan	2.037.997.750	1.879.715.538	92,23%	92,23%	158.282.212
15.03	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perhubungan	270.510.000	240.471.706	88,90%	88,90%	30.038.294
15.04	Peningkatan Koordinasi Teknis Perhubungan se Provinsi NTT	313.190.500	280.266.200	89,49%	89,49%	32.924.300
17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	2.038.468.200	440.419.207	21,61%	21,61%	1.598.048.993
17.01	Peningkatan Mutu Pelayanan Operator dan Modal Angkutan	444.675.000	428.336.310	96,33%	96,33%	16.338.690
17.02	Manajemen Lalu Lintas Angkutan Penumpang, Barang dan Jasa	400.000.000	398.637.580	99,66%	99,66%	1.362.420
17.03	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Berlalu Lintas	655.397.700	611.940.880	93,37%	93,37%	43.456.820

17.04	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	538.395.500	533.803.900	99,15%	99,15%	4.591.600
-------	---	-------------	-------------	--------	--------	-----------

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran belanja program/kegiatan sektor perhubungan, adalah :

Masih lambatnya penyelesaian administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tugas perjalanan dinas oleh para petugas yang melaksanakan perjalanan dinas. Kurangnya koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kab/Kota terkait dengan kegiatan – kegiatan yang akan melibatkan Dinas Perhubungan Kab/Kota, sehingga ada kegiatan yang batal dilaksanakan karena Dinas Perhubungan Kabupaten tidak dapat menghadiri.

D. SOLUSI

- a) Memberikan penegasan kepada para pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas agar segera menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban setelah pulang tugas.
- b) Melakukan koordinasi lebih awal dengan mitra kerja Perhubungan terkait kegiatan-kegiatan yang melibatkan para mitra kerja, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan para mitra kerja dapat terlaksana.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan itu, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap unit eselon II diwajibkan membuat Laporan Kinerja dan Keuangan yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan rencana strategik dan perjanjian kinerja yang telah dibuat selama satu tahun.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 UPT Perijinan & Pengawasan LLAJ Tahun Anggaran 2018, nilai akhir capaian Kinerja Dinas dan 5 (lima) UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ adalah 94,41 % dari target satu tahun 100 %. Hasil tersebut merupakan penyelenggaraan atas 6 (enam) sasaran utama yang dilakukan pengukuran kinerja sesuai indikator-indikator kinerja yang ada yang dicapai dalam Tahun Anggaran 2018 melalui intervensi program dan kegiatan serta dukungan anggaran baik melalui sumber dana APBD Provinsi NTT maupun dana APBN Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018. Sasaran yang sudah ditetapkan dalam perencanaan strategik dan perjanjian kinerja secara bertahap terus diupayakan melalui kebijakan, program dan kegiatan dalam rencana kerja (Renja) tahunan guna mewujudkan Visi dan Misi serta Tujuan Pembangunan Sektor Perhubungan pada masa yang akan datang.

Terdapat beberapa indikator kinerja yang pencapaiannya belum 100% akan menjadi perhatian SKPD Dinas Perhubungan Provinsi NTT pada tahun anggaran berikutnya sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai terutama bagi terwujudnya peningkatan pelayanan jasa transportasi darat, laut dan udara yang terpadu, selamat, aman dan lancar.

B. S A R A N

Untuk sinergitas dan harmonisasi penetapan indikator-indikator kinerja dan formula perhitungannya antara berbagai dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja) dengan Indikator Kinerja Utama, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Penilaian Laporan Kinerja, perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar SKPD tersebut sejak proses penyusunan sampai pada penetapannya sehingga terjadi korelasi dan keterkaitan antara berbagai dokumen yang ada untuk menghindari adanya penyesuaian - penyesuaian kembali dokumen karena perbedaan interpretasi / pandangan, pemahaman dan penilaian terhadap suatu sasaran dan indikator kinerja yang ada .

Dalam rangka peningkatan kualitas penyajian dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perlu dilakukan pelatihan dan workshop baik kepada pejabat yang langsung menangani penyusunan Laporan Kinerja ini maupun kepada staf dan aparatur lingkup Pemerintah Provinsi NTT sehingga diperoleh pemahaman dan pengetahuan bersama terhadap indikator-indikator kinerja serta analisis data dan informasi yang ada termasuk dalam aspek penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang ada.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat berguna bagi pengambil kebijakan, aparatur pada unit kerja masing-masing untuk meningkatkan kualitas dan hasil kerja dalam perumusan program, kegiatan dan penganggaran pada sektor perhubungan pada masa yang akan datang sebagai sektor yang berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, membangun konektivitas antar daerah dan wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, Januari 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



ISYAK SUKA, ST, MN
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19631112 199803 1 004